



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2023**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....		i
DAFTAR ISI		i
DAFTAR LAMPIRAN		ii
KATA PENGANTAR		vi
RINGKASAN EKSEKUTIF		1
BAB I PENDAHULUAN		9
1.1	Latar Belakang	9
1.2	Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	10
1.3	Maksud dan Tujuan	13
1.4	Isu-isu Strategis	14
1.5	Cascading Kinerja	14
1.6	Peta Proses Bisnis	15
1.7	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		18
2.1	Rencana Strategis	18
2.2	Tujuan dan sasaran	20
2.3	Kebijakan, Strategi dan Program	21
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS.....		27
3.1	Analisis Capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023	27
3.2	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 – 2023	29
3.3	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode renstra	34
3.4	Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional (target SPM)	36
3.5	Akuntabilitas keuangan	38
3.6	Pencapaian kinerja dan anggaran	39
3.7	Efisiensi penggunaan sumber daya	40
3.8	Prestasi dan Penghargaan	41
BAB IV PENUTUP		43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta lampiran perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
DUMAI



ZULFAHREN, S.Sos,M.Si
NIP.197601172002121003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 53 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka sebagai unsur teknis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Dumai menjalankan fungsi Bidang bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke IV RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik “ dan SASARAN Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu “ Meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah. “

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 1 (Satu) Tujuan dengan 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 5 (Lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 30 (Tiga puluh) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

- I. Program Penunjang Urusan Admindukcapil
- II. Program Pendaftaran Penduduk
- III. Program Pencatatan Sipil
- IV. Program Pengelolaan Informasi Kependudukan
- V. Program Penyusunan Profil Kependudukan

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2023 mengalami 1 (Satu) kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	69%
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	73%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar **Rp.7.908.091.365,-** untuk melaksanakan 4 (empat) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.

Program Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	Rp. 7.491.571.265	APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 237.541.200	APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 99.356.000	APBD
4.	Program PIAK	Rp. 79.622.900	APBD
J U M L A H		Rp. 7.908.091.365	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	Rp. 8.518.918.015	APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 237.541.200	APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 99.356.000	APBD
4.	Program PIAK	Rp. 79.622.900	APBD
5.	Program Penyusunan Profil Kependudukan	Rp. 20.000.000	APBD
J U M L A H		Rp. 8.955.501.115	

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasardan perlindungan sosial .	Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100%	100%	100%	Sangat Berhasil			
2.		Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	69%	51,85%	75,07%			Cukup Berhasil	
3.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	88	93,05	105,73%	Sangat Berhasil			
4		Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	73%	92,08%	126%	Sangat Berhasil			

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori 2 (dua) yaitu Sangat Berhasil (pilih salah satu).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.8.955.501.115 (Delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus

satu ribu seratus lima belas rupiah) bersumber dari APBD Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 8.004.760.558 (*delapan milyar empat juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 950.740.557 (*Sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*).

1. Belanja Operasi	:	Rp.	8.004.760.558
2. Belanja Modal	:	Rp.	950.740.557
Jumlah	:	Rp.	<u>8.955.501.115</u>

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : 1.Memantapkan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan data kependudukan yang valid	Persentase jenis data kependudukan yang dapat Diakses oleh pengguna	100%	100%	100%			
Sasaran : 1.Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan	Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	69%	51,85%	75,07%			

dasar dan perlindungan sosial							
Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88	93,05	105,73%			
Sasaran Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	73%	92,08%	126%			
Program: Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten Kota					Rp.8.502.981.015	Rp.8.267.748.433	97,23%
Program: Pendaftaran Penduduk					Rp.237.541.200	Rp.235.657.400	99,20%
Program: Pelayanan Pencatatan Sipil					Rp.99.356.000	Rp.98.290.000	98,92%
Program: PIAK					Rp.79.622.900	Rp.79.160.000	99,41%
Program Penyusunan Profil Kependudukan					Rp.20.000.000	Rp.19.365.000	96,8%

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai mengalokasikan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan

Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI	KETERANGAN
1.	Memantapkan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan data kependudukan yang valid	Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100%	99,20	Efisien	
2.		Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	75,07%	99,20	Efisien	
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	105,73%	98,92	Efisien	
4		Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	126%	99,41	Efisien	

5.				96,8	Efesi n		
----	--	--	--	------	------------	--	--

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pada *Indikator Kinerja Utama secara keseluruhan yaitu dari keseluruhan Program* tingkat efisiensinya adalah 2,77% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (97,23%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya **EFISIEN;**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKJIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor... Tahuntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 53 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 pasal 37 ayat (4) yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui

Sekretaris Daerah,

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah;
4. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
7. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
8. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
9. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
10. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
11. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
12. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
13. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
14. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

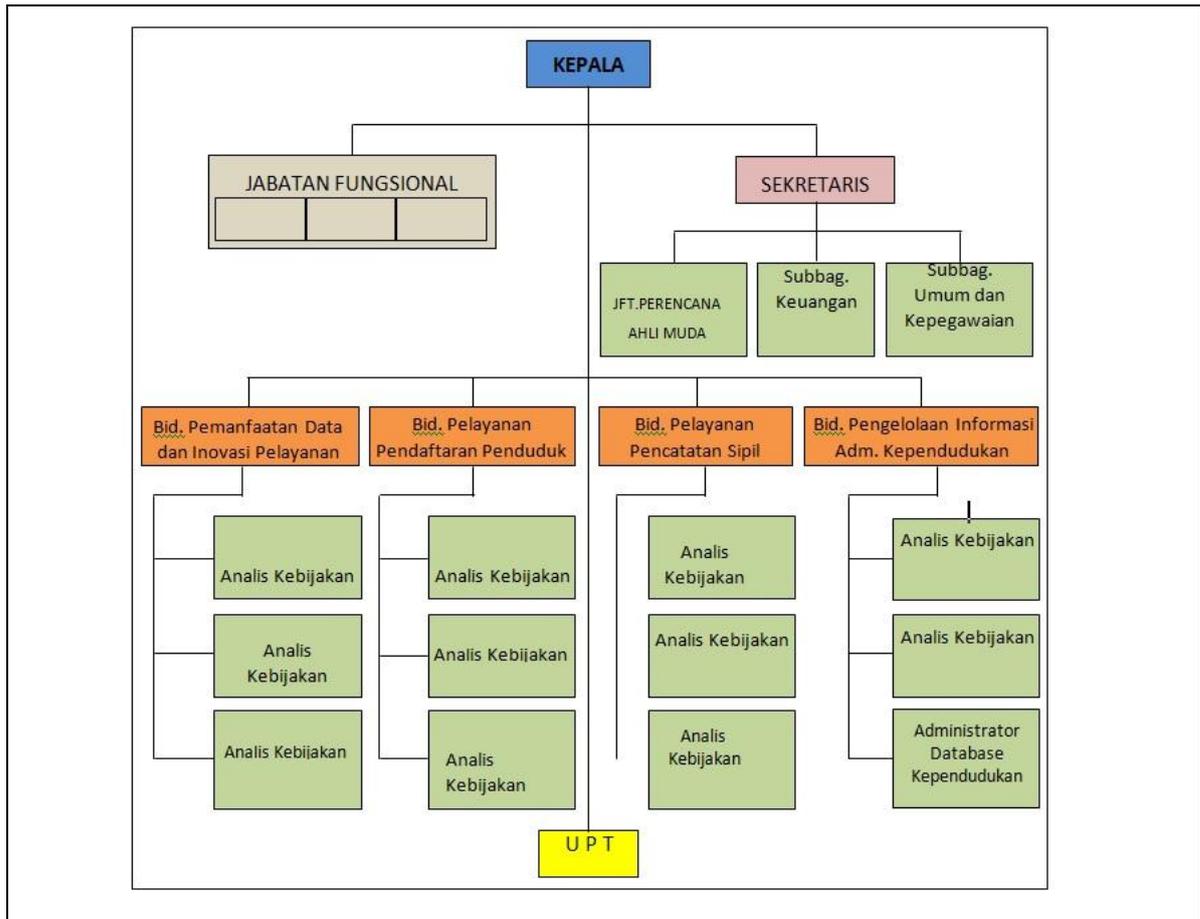
Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Dumai terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi
 - a. JFT.Perencana Ahli Muda
 - b. Sub.Bag.Keuangan
 - c. Sub.Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan

- a. Analisis Kebijakan Kerjasama
- b. Analisis Kebijakan Inovasi dan Pelayanan
- c. Analisis Kebijakan Pemanfaatan Data
- d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Analisis Kebijakan
 - b. Analisis Kebijakan
 - c. Analisis Kebijakan
- e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Analisis Kebijakan
 - b. Analisis Kebijakan
 - c. Analisis Kebijakan
- f. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Analisis Kebijakan
 - b. Analisis Kebijakan
 - c. Administrator Data Base
- g. UPT

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu

strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatata sipil dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipi yang perlu ditangani sbb:

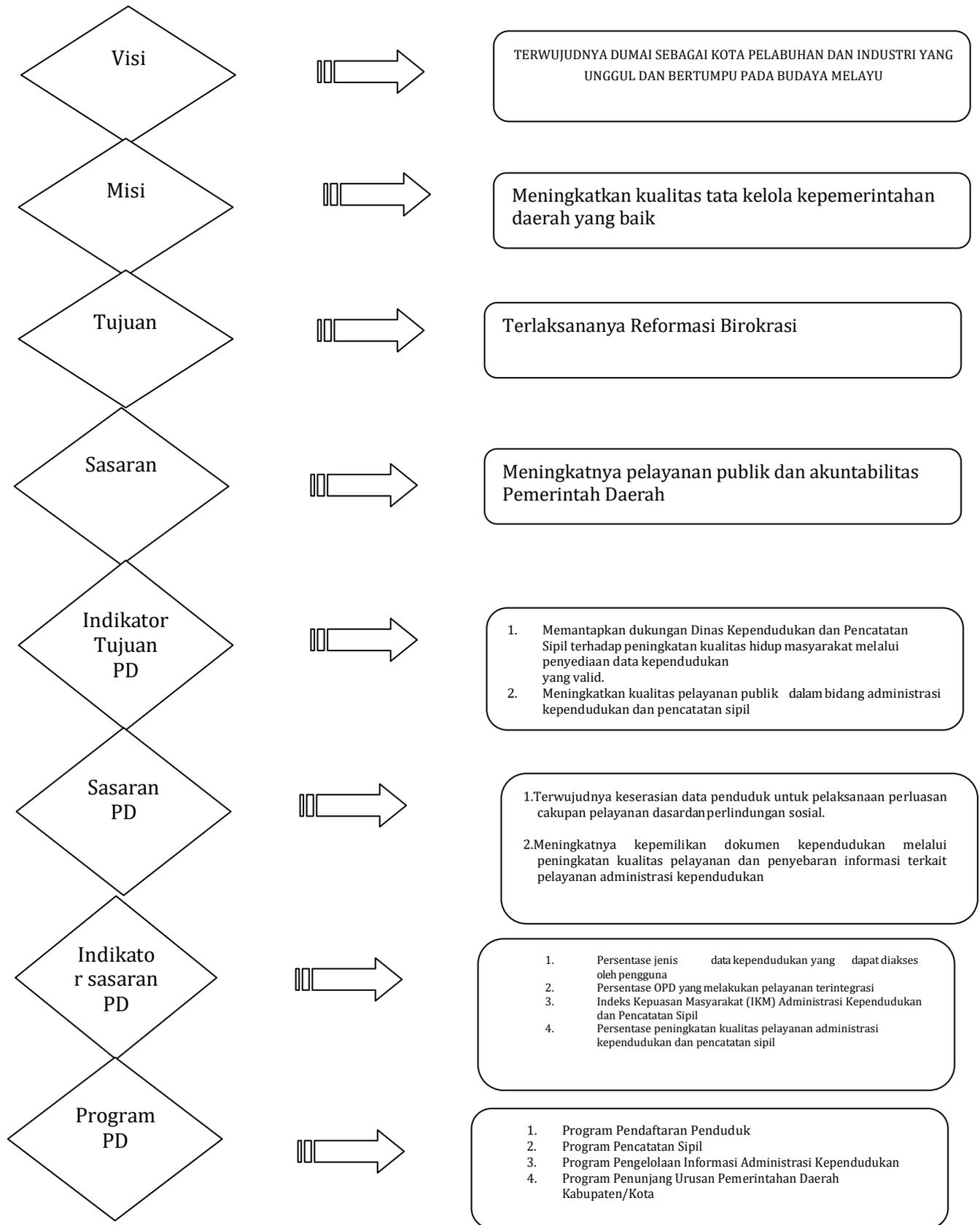
- 1. Pemantapan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan data kependudukan yang valid .***
- 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil***

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.2

Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

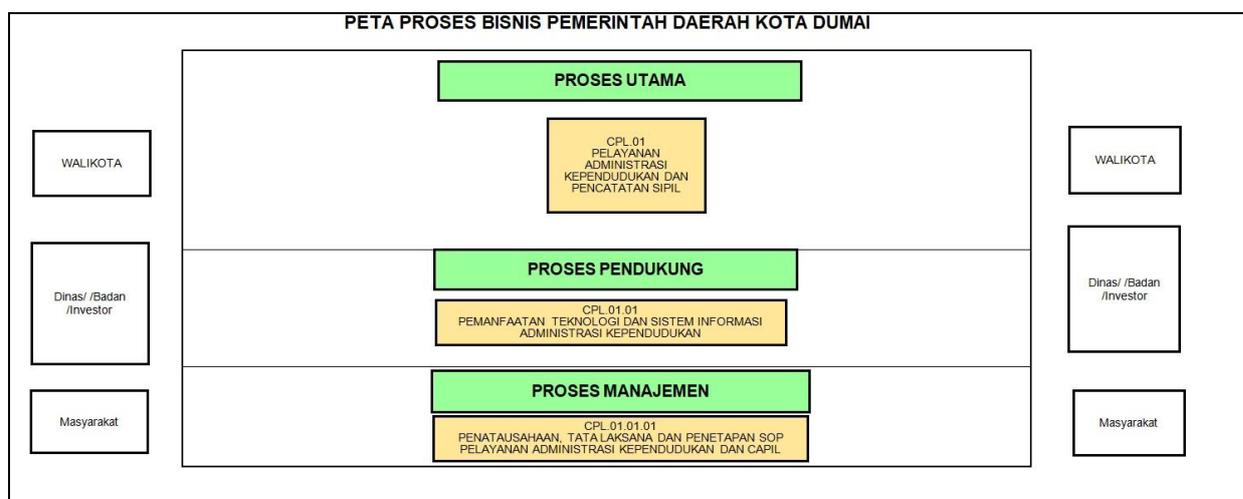


1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas.....sebagaimana skema berikut:

Gambar 1.3.

Peta Proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1317.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel.....

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.	Rencana Aksi yang belum ditetapkan sampai tingkat pelaksana	Agar Setiap Pegawai untuk menetapkan Rencana Aksi
2.	Belum terpublikasi nya Kinerja pada website OPD secara tepat waktu	Melakukan Publikasi pada Website OPD
3.	Perlunya SOP pengukuran kinerja	Agar disusun SOP pengukuran Kinerja
4.	Penggambaran Crosscutting yang lebih terperinci	Melakukan Penyusunan Crosscutting lebih terperinci.

Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Setiap pegawai akan menetapkan Rencana aksi berdasarkan Penetapan Kinerja berdasarkan e kinerja	2 Bulan
2.	Akan melakukan Publikasi di website OPD	1 bulan
3.	Akan melakukan penyusunan SOP pengukuran Kinerja	6 Bulan
4.	Penggambaran Crosscuting yang lebih terperinci	6 Bulan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah.**

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota

Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 2.1..



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dalam kurun waktu 5

(lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu					
Misi ke IV : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	73%

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada

program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Dumai Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu				
MISI ke IV : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik.				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	1. Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan yang cepat dan bisa diakses dari mana saja	1. <i>Membangun dan mengembangkan aplikasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan layanan pengaduan masyarakat berbasis IT;</i>	
			2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan;	
			3. Meningkatkan kerjasama dalam rangka percepatan pelayanan dan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	
		2. Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan yang cepat dan bisa diakses dari mana saja	1. <i>Membangun dan mengembangkan aplikasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan layanan pengaduan masyarakat berbasis IT;</i>	
	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan			2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan;
				3. Meningkatkan kerjasama dalam rangka percepatan pelayanan dan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
		1. Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan yang cepat dan bisa diakses dari mana saja	1. <i>Membangun dan mengembangkan aplikasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan</i>	

			layanan pengaduan masyarakat berbasis IT;
		2. Meningkatkan profesionalisme petugas pelayanan	1. Peningkatan kualitas petugas pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan teknis; 2. Peningkatan kuantitas penyelenggara pelayanan melalui penyediaan jasa tenaga pelayanan.
		3. Mensosialisasikan aturan dan kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	1. Menyebarkan informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.\
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama

1	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasardan perlindungan sosial	1 2	Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	1 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasardan perlindungan sosial .	1.Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100%
		2.Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	69%
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	3.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88
		4.Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	73%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sebagaimana tertuang

didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar *Rp.8.955.115.501,- (Delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima belas ribu lima ratus satu rupiah)* untuk melaksanakan 5 (Lima) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.5
Program kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.491.571.265	APBD
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	237.541.200	APBD
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	99.356.000	APBD
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	79.622.900	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0	APBD
J U M L A H		Rp. 7.908.091.365	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Program kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.518.981.015 1	APBD
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	237.541.200	APBD
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	99.356.000	APBD
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	79.622.900	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	20.000.000	APBD
J U M L A H		Rp.8.955.115.501	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

- a. Rumus : $capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan

persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$b. \text{ Rumus : } \text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 4(empat) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tahun 2023

berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel 3.3.dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasardan perlindungan sosial .	Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100	100%	100%	100%	100%	Sangat berhasil
		Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	40,7%	74%	69%	51,85%	75,07%	Berhasil
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	92,2	107%	88	93,05	105,73%	Sangat berhasil
		Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	86%	191	73%	92,08%	126%	Sangat berhasil

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna
 - a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna menunjukkan capaian yang meningkat/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100% realisasi sebesar 100% tercapai 100% atau bernilai kinerja

sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 sesuai target sebesar 100%

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Konsolidasi Data yang rutin
- Koordinasi penyampaian hambatan ke dirjen Duk capil Kemendagri yang rutin.

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna adalah sebagai berikut:

- Jumlah Sumber daya yang kurang untuk pengolahan dan koordinasi Data base kependudukan

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna adalah sebagai berikut:

- Akan terus mempertahankan capaian kinerja.
- Pengusulan untuk penambahan Sumber Daya baik Manusia maupun Fisik

2. **Indikator** Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 69% realisasi sebesar 51,85% tercapai 75,07% atau bernilai kinerja Sedang. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 40,7% atau tercapai sebesar 74%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 1,07%

b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi kurang target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Regulasi dan infrastruktur mendukung.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi adalah sebagai berikut:
 - Perubahan Regulasi dipusat yang mengharuskan penerapan ISO untuk Kerjasama Pemanfaatan data bagi OPD.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi adalah sebagai berikut:
 - Terus melakukan Koordinasi secara intensif mengenai regulasi pemanfaatan dan pelayanan secara terintegrasi.

3. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 88 realisasi sebesar 93,05 tercapai 105,73% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 92,2 atau tercapai sebesar 107%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 1,3% penurunan tidak berdampak terhadap hasil kinerja karena adanya peningkatan target, dan capaian untuk target 2023 telah terlampaui 5,73 %.
- b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Adanya peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Adanya pelayanan berbasis elektronik / Online
 - Adanya pelayanan secara jemput Bola
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:
 - Adanya stigma negatif terhadap pelayanan yang lamban dan tidak efisien.

d. Tindak Lanjut Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

- Melakukan pendekatan ke masyarakat untuk merubah stigma negatif dengan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan.

4. Indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 73% realisasi sebesar 92,08% tercapai 126% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 86% .atau tercapai sebesar 191%, maka capaian tahun 2023 naik sebesar sebesar 6%.

b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Adanya peningkatan Sarana dan Prasarana
- Adanya pelayanan berbasis elektronik / Online
- Adanya pelayanan secara jemput Bola
- Adanya Mall Pelayanan Publik (MPP)

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

- Kurang nya sumber daya Manusia dan anggaran untuk mendukung pelayanan online dan pelayanan jemput bola

d. Tindak Lanjut Capaian Indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

- Melakukan inovasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk terus meningkatkan pelayanan.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasardan perlindungan sosial .	Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100%	100%	100	100%	100%	100%
2.		Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	56%	69%	40,7%	51,85%	74%	75,07%
3.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	86	88	92,2	93,05	107%	105,73%
4.		Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	45%	73%	86%	92,08%	191%	126%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1a. Pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna dengan target pada tahun 2022 adalah 100% berasal dari perhitungan jumlah Laporan Data Kependudukan yang tersusun sebanyak 2 Laporan dibagi dengan Jumlah Laporan Data Kependudukan yang Harus tersedia setiap

tahun nya yaitu 2(dua) laporan.

- b. Pada tahun 2022 target 100%. Realisasi pada tahun 2022 adalah 100% dengan capaian 100%.
 - c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 100% dan realisasinya adalah 100% dengan capaian kinerja 100%
- 2a. Indikator Kedua adalah Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi dengan target pada tahun 2022 adalah 56% berasal dari perhitungan Jumlah OPD yang melakukan Kerjasama pemanfaatan dan Pelayanan melalui kerjasama sebanyak 14(empat belas(dibagi dengan Target OPD yang melakukan Kerjasama sebanyak 27(dua puluh tujuh) OPD.
- b. Pada tahun 2022 target 56%. Realisasi pada tahun 2022 adalah 40,7% dengan capaian 74%.
 - c. Pada tahun 2023 target kinerja menjadi 69% dan realisasinya adalah 51,85% dengan capaian kinerja 75,07%.
- 3a. Indikator ketiga adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan target pada tahun 2022 adalah berasal dari Survei kepuasan masyarakat tahun 2022 .
- b. Pada tahun 2022 target 86. Realisasi pada tahun 2022 adalah 92,2 dengan capaian 107%.
 - c. Pada tahun 2023 target kinerja menjadi 88 dan realisasinya adalah 93,05 dengan capaian kinerja 105,73%.
- 4a. Indikator keempat adalah Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan target pada tahun 2022 adalah Akumulasi rata rata Indikator Kinerja pusat (persentase cakupan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta kematian, perekaman KTP, Kepemilikan KIA, dan Akta kelahiran) tahun 2022 .
- b. Pada tahun 2022 target 45%. Realisasi pada tahun 2022 adalah 86% dengan capaian 191%.
 - c. Pada tahun 2023 target kinerja menjadi 73% dan realisasinya adalah 92,08% dengan capaian kinerja 126% Dari analisis diatas, dapat dilihat

bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) tahun 2023 dapat dikatakan BERHASIL.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasardan perlindungan sosial .	Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100%	100%	Tercapai
2		Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	100%	51,85%	Belum Tercapai
3	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	92	93,05	Tercapai
4		Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	92,08%	Belum Tercapai

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode

RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna sebagai berikut :

- Akan terus mempertahankan capaian kinerja.
- Pengusulan untuk penambahan Sumber Daya baik Manusia maupun Fisik.

2. Capaian Indikator Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi sebagai berikut :

- Terus melakukan Koordinasi secara intensif mengenai regulasi pemanfaatan dan pelayanan secara terintegrasi.

3. Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut :

- Melakukan pendekatan ke masyarakat untuk merubah stigma negatif dengan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan.

4. Capaian Indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut :

- Melakukan inovasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk terus meningkatkan pelayanan.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel.....berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1.	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan	Persentase jenis data kependudukan	100%	100%	Isi dengan Ada target nasional yg berhubungan

	dasar dan perlindungan sosial yang dapat diakses oleh pengguna				langsung dengan kinerja Dinas
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	86%	90%	

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.8.955.501.115 (*Delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus satu ribu seratus lima belas rupiah*) bersumber dari APBD Kota Dumai, Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 8.004.760.558 (*delapan milyar empat juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp.950.740.557 (*Sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.700.220.833,-, *terdiri dari* Belanja Operasi Rp. 7.659.406.183,- dan Belanja Modal terealisasi Rp. 1.040.814.650,-.

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk	Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten /	Rp.8.502.981.015	Rp.8.267.748.433	97,23%	98,69%

	pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasardan perlindungan sosial .	Kota				
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.237.541.200	Rp.235.657.400	99,20%	
		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp.99.356.000	Rp.98.290.000	98,92%	
		Program PIAK	Rp.79.622.900	Rp.79.160.000	99,41%	

Total anggaran belanja adalah Rp.8.955.501.115 dengan realisasi Rp.8.700.220.833 atau dengan capaian sebesar 97,32% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% (apabila tidak mencapai 100%) dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Anggaran yang tidak terserap adalah tunjangan dan Gaji PNS
2. Sisa dari belanja modal.

3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut::

Tabel 3.8.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN

1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : 1.Memantapkan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan data kependudukan yang valid	Persentase jenis data kependudukan yang dapat Diakses oleh pengguna	100%	100%	100%			
Sasaran : 1.Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	69%	51,85%	75,07%			
Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88	93,05	105,73%			
Sasaran Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	73%	92,08%	126%			
Program: Penunjang urusan					Rp.8.502.981.015	Rp.8.267.748.433	97,23%

Pemerintah daerah Kabupaten Kota							
Program: Pendaftaran Penduduk					Rp.237.541.200	Rp.235.657.400	99,20%
Program: Pelayanan Pencatatan Sipil					Rp.99.356.000	Rp.98.290.000	98,92%
Program: PIAK					Rp.79.622.900	Rp.79.160.000	99,41%

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama secara keseluruhan yaitu dari keseluruhan Program* tingkat efisiensinya adalah 2,77% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (97,23%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya ***EFISIEN***;

4.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Prestasi dan Penghargaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1				
2				
3				
4	dst			

Catatan : Agar dilengkapi dengan dokumentasi dan data dukung dalam

penjelasan yang diuraikan. Dapat ditambahkan dengan grafik, diagram, foto dan screenshot gambar sebagai eviden.

BAB IV

PENUTUP

Memberikan penjelasan simpulan terhadap capaian target, apakah telah/belum memenuhi target, apakah telah efisien dan apakah terdapat penghematan sumber daya dalam pencapaian target tahun 2023.

Permasalahan yang dihadapi dan saran solusi/jalan keluar untuk masa yang akan datang. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk perbaikan.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, Januari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
DUMAI**



ZULFAHREN, S.Sos,M.Si
NIP.197601172002121003

2.Rencana Kerja Tahun 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Kelembaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Kelembaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Takut Ukur	Target
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									11,737,766,231		10,880,064,565		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									10,655,995,331		9,882,839,465		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									36,712,100		53,000,000		
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100%	2 dokumen	5 dokumen	27,896,900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	30,000,000
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100%	1 dokumen	5 dokumen	3,442,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	13,000,000
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100%	1 dokumen	5 dokumen	2,628,800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	5,000,000
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100%	1 Laporan	5 dokumen	2,743,900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	5,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									4,433,134,440		5,112,328,500		
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Laporan keuangan Perangkat Daerah		100%	31 orang / bulan	3 Laporan	4,419,169,040	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	5,097,328,500
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan keuangan Perangkat Daerah		100%	1 laporan	3 Laporan	3,976,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	5,000,000

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Kelembaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Kelembaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Takut Ukur	Target
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan keuangan Perangkat Daerah		100%	6 Laporan	7 Laporan	9,989,300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	10,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									21,908,400		25,000,000		
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunya laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100%	1 laporan	1 Laporan	21,908,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	25,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									200,458,565		212,000,000		
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Keengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Keengkapannya	Terkelaksananya PNS yang melaksanakan tertib administrasi kepegawaian		100%	1 paket	31 Orang	10,262,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	12,000,000
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terkelaksananya PNS yang melaksanakan tertib administrasi kepegawaian		100%	0 Orang	6 orang	45,780,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	50,000,000
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terkelaksananya PNS yang melaksanakan tertib administrasi kepegawaian		100%	100 orang	31 Orang	144,416,165	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	190,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah									1,907,628,826		2,595,000,000		
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Terkelaksananya administrasi umum perangkat daerah		100%	2 paket	0 Paket	32,631,800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	120,000,000

Unit Organisasi : 2.12.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
 Sub Unit Organisasi : 2.12.00.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang disediakan	Tefaksananya administrasi umum perangkat daerah		100%	2 paket 0 Paket	12 Bulan	1.250.165,496	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	1.510.000,000
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Tefaksananya administrasi umum perangkat daerah		100%	1 paket	12 Bulan	64.754,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	90.000,000
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Tefaksananya administrasi umum perangkat daerah		100%	3 paket 0 Paket	12 Bulan	41.228,800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	60.000,000
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Tefaksananya administrasi umum perangkat daerah		100%	1 paket 0 Paket	12 Bulan	56.627,810	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	70.000,000
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Tefaksananya administrasi umum perangkat daerah		100%	1 dokumen	12 Bulan	15.600,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	30.000,000
2.12.01.2.06.09	Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tefaksananya administrasi umum perangkat daerah		100%	36 laporan	12 Bulan	412.163,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	525.000,000
2.12.01.2.06.11	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tefaksananya administrasi umum perangkat daerah		100%	1 dokumen	12 Bulan	32.457,530	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	100.000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									3.050.078,000					904.260,965
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Tefaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		100%	1 unit	76 Unit	450.000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	0

Unit Organisasi : 2.12.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
 Sub Unit Organisasi : 2.12.00.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Tefaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		100%	110 unit	76 Unit	679.382,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	50.000,000
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Tefaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		100%	54 unit	76 Unit	1.021.493,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	854.260,965
Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									790.110,000					816.000,000
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tersedianya jasa penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		100%	1 laporan	12 Bulan	124.150,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	170.000,000
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tersedianya jasa penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		100%	1 laporan	12 Bulan	666.000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	666.000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									215.125,000					225.250,000
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Relian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Relian	Tersedianya jasa barang milik perangkat daerah yang dipelihara dengan baik		100%	6 unit	3 jenis	116.060,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	145.250,000
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya jasa barang milik perangkat daerah yang dipelihara dengan baik		100%	65 unit	3 jenis	98.465,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	90.000,000
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									614.338.300					450.000,000
Pelayanan Pendaftaran Penduduk									614.338.300					450.000,000
2.12.02.2.01.01	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan penduduk yang terdaftar administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Tersedianya jenis layanan pendaftaran penduduk		85%	1 dokumen	20 jenis	219.968,800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan penduduk yang terdaftar administrasi kependudukan	85%	250.000,000

Unit Organisasi : 2.12.000.000.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
 Sub Unit Organisasi : 2.12.000.000.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		
			Kalkaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Target				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Kalkaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan	
2.12.03.02.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan penduduk yang terbta administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Tersedianya jenis layanan pendaftaran penduduk		85 %	0 Dokumen 1 dokumen	20 Jenis	394,365,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan penduduk yang terbta administrasi kependudukan	85 %	200,000,000
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								122,225,100					122,225,100
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil								122,225,100					122,225,100
2.12.03.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan penduduk yang terbta administrasi pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Tersedianya jenis layanan pencatatan sipil		85 %	0 Dokumen	23 Jenis	122,225,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan penduduk yang terbta administrasi pencatatan sipil	85 %	122,225,100
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								285,259,900					345,000,000
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								149,802,700					175,000,000
2.12.04.2.01.02	Keja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Tersedianya OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data		69 %	1 dokumen 0 Dokumen	11 OPD	149,802,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	69 %	175,000,000
2.12.04.2.03	Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								135,457,200					170,000,000
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Tersusunnya Laporan Data Agregat Kependudukan		69 %	2 dokumen	2 Laporan	135,457,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	69 %	170,000,000
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								59,947,600					80,000,000
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan								59,947,600					80,000,000
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Persentase data perkembangan kependudukan yang disajikan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang termasuk	Tersusunnya dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan		67 %	1 dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen	59,947,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase data perkembangan kependudukan yang disajikan	67 %	80,000,000
TOTAL									11,737,766,231					10,880,064,565

3.Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZULFAHREN, S. Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



S

Dumai, Januari 2023



ZULFAHREN, S. Sos, M.Si
NIP. 197601172002121003

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN
				2023
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	%	69
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	73

Sasaran 1 : Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 7.491.571.265,-

Sasaran 2 : Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan

1. Program Pendaftaran Penduduk Rp.237.541.200,-

2. Program Pencatatan Sipil Rp.99.356.000,-

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp.79.622.900,-

JUMLAH Rp.7.908.091.365,-



Dumai, Januari 2023

Pihak Pertama
KEPALA



ZULFAHREN, S. Sos, M.Si
 NIP. 197601172002121003

4.Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZULFAHREN, S. Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS
Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	Persentase Jenis Data Kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	%	100
	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	%	56
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	86
	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	45

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.518.981.015,-
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 237.541.200,-
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 99.356.000,-
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 79.622.900,-

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua
WALIKOTA DUMAI



H. PAISAL, SKM, MARS

Pihak Pertama
KEPALA



ZULFAHREN, S. Sos, M.Si
NIP. 19760117 200212 1 003

5. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasardan perlindungan sosial .	Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100	100%	100%	100%	100%	Sangat berhasil
		Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	40,7%	74%	69%	51,85%	75,07%	Berhasil
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	92,2	107%	88	93,05	105,73%	Sangat berhasil
		Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	86%	191	73%	92,08%	126%	Sangat berhasil

			2	Perbaikan Meja	12	12	Bulan	100.00	100.000.000	96.09.000	96,09	%								
			3	Perbaikan Perlatan dan Meja Lainnya	12	12	Bulan	100.00	876.625.000	817.625.000	93,28	%								
			8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perantara/Utanan					179.436.000	178.638.000	99,58	%								
			1	Perbaikan atau Pemeliharaan Banga Pemeliharaan, Pajak dan	5	5	Berkala	100.00	85.700.000	82.000.000	95,69	%								
			2	Pemeliharaan perlatan dan meja lainnya	12	12	Bulan	100.00	93.736.000	96.638.000	103,09	%								
			2	PROGRAM PENDEKATAN FIDUCIAR					287.541.300	238.657.400	83,21	%								
			1	Penyusunan Perencanaan Pendukung					287.541.300	236.657.400	82,31	%								
			1	Revisi dan Revisi/Perbaikan Perencanaan dan Rancangan Administrasi	2	2	Laporan	100.00	70.000.000	70.000.000	100,00	%								
			2	Perencanaan, Perencanaan dan Perencanaan Dokumen Atas	1	1	Laporan	100.00	96.653.200	109.710.000	113,57	%								
			3	PROGRAM PENCAIATAN SPM					98.250.000	98.250.000	100,00	%								
			1	Penyusunan Pencatatan SPM					98.250.000	98.250.000	100,00	%								
			1	Perencanaan, Perencanaan dan Perencanaan Dokumen Atas	1	1	Laporan	100.00	98.250.000	98.250.000	100,00	%								
			4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI BERKEDUKAAN					79.622.900	79.160.000	99,31	%								
			1	Pengelolaan Data Kapasitas dan Pemanfaatan dan					35.777.900	35.500.000	99,25	%								
			1	Penyusunan dan Perencanaan Data Kapasitas	12	12	Periode	100.00	35.777.900	35.500.000	99,25	%								
			2	Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Administrasi					43.845.000	43.660.000	99,58	%								
			1	Penyediaan dan Pengelolaan yang sesuai dan lengkap	1	1	Laporan	100.00	43.845.000	43.660.000	99,58	%								
			3	PROGRAM PENYUSUNAN PROFIL BERKEDUKAAN					20.000.000	19.383.000	96,91	%								
			1	Penyusunan Profil Berkedudukan					20.000.000	19.383.000	96,91	%								
			1	Penyusunan profil data pasien dengan dan proyeksi	1	1	Dokumen	100.00	20.000.000	19.383.000	96,91	%								